



Determinan Indeks Pembangunan Manusia dengan Pendekatan Maqasid Syariah Al-Ghazali

Yusuf Bahtiar¹ & Mulawarman Hannase²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia

Article Infortion

Article history:

Received 10 March 2021;

Received in revised form 21 April

2021; Available online 29 July

2021

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine what influences the Determinants of the Human Development Index in 5 Provinces of Eastern Indonesia. This study uses time series data and annual cross-sections during 2010-2018 in 5 provinces of Eastern Indonesia. Panel data analysis method with Fixed Effect Model (FEM) approach with Maqasid Syariah Al-Ghazali approach. The results of the study show that the *ifz* Nafs variable and the first *ifz* Māl variable have a negative effect on the Human Development Index in 5 Provinces of Eastern Indonesia. Meanwhile, the second element *ifz* 'Aql and *ifz* Māl variable have a positive and significant impact on the Human Development Index in 5 Provinces of Eastern Indonesia.

Keywords: IPM, Maqasid Syari'ah, Al-Ghazali, Fix Effect Model

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui determinan yang mempengaruhi Determinan Indeks Pembangunan Manusia di 5 Provinsi Indonesia Bagian Timur. Penelitian ini menggunakan data time series dan cross-section tahunan selama tahun 2010-2018 pada 5 Provinsi Indonesia Bagian Timur. Metode analisis data panel dengan pendekatan Fixed Effect Model (FEM) dengan pendekatan Maqasid Syariah Al-Ghazali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Variabel *Hifz* Nafs dan Variabel *Hifz* Māl pertama berpengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia di 5 Provinsi Indonesia Bagian Timur. Sedangkan *Hifz* 'Aql dan Variabel *Hifz* Māl elemen kedua berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di 5 Provinsi Indonesia Bagian Timur.

Kata kunci: IPM, Maqasid Syari'ah, Al-Ghazali, Fix Effect Model

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi adalah upaya atau proses untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Pada awalnya, pembangunan ekonomi suatu negara dikatakan berhasil jika negara tersebut mampu menciptakan peningkatan produksi semaksimal mungkin, yaitu dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Sumber daya manusia memiliki peran yang penting bagi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara. Dalam melihat kemajuan perekonomian negara, faktor kualitas pembangunan manusia menjadi determinan lain yang perlu diperhatikan khususnya bagi negara dengan jumlah penduduk banyak seperti Indonesia. Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor produksi selain sumber daya alam, modal, maupun teknologi yang

berkontribusi dalam pembangunan ekonomi. Tercapainya SDM yang dapat bersaing dalam pasar internasional dilihat dari keberhasilan upaya suatu negara dalam membangun kualitas manusianya. *United Nations Development Programme* (UNDP) telah mengeluarkan indeks yang dapat menggambarkan tingkat pembangunan manusia di seluruh negara termasuk Indonesia yaitu Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*).

Tabel 1. IPM Tahun 2018

Provinsi	Nilai IPM
NTT	64,39
GORONTALO	67,71
MALUKU	68,87
PAPUA BARAT	63,74
PAPUA	60,06

Sumber: BPS, 2019

Author Correspondence:

E-mail: yusuf.bahtiar@ui.ac.id, mulawarmanhannase@ui.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.33005/jdep.v5i1.313>

Berdasarkan Tabel 1. Sebagian besar provinsi dengan tingkat pembangunan manusia yang masih rendah berada di Kawasan Timur Indonesia. Terdapat sepuluh provinsi dari tiga belas provinsi di Indonesia Timur yang masih memiliki indeks pembangunan manusia rendah hingga menengah. Sementara tiga provinsi lainnya, yaitu Bali, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan sudah memiliki indeks pembangunan manusia maju. Tabel 1.1 di atas menggambarkan lima provinsi di Kawasan Timur Indonesia dengan nilai IPM yang masih rendah di antara provinsi lainnya.

Dari lima provinsi tersebut, Provinsi Papua memiliki nilai IPM yang terendah yaitu sebesar 60,06. Sedangkan empat provinsi lainnya memiliki nilai IPM yang sudah berada di atas 60. Papua merupakan provinsi satu-satunya di Indonesia dengan tingkat pembangunan manusia yang masih rendah. Sedangkan Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, Maluku, dan Papua Barat termasuk ke dalam beberapa provinsi dengan tingkat pembangunan manusia menengah di Indonesia.

Pada penelitian ini, rumusan masalah dibatasi dengan penggunaan *Human Development Index* sebagai indikator pertumbuhan ekonomi yang dirasa cukup komprehensif untuk mengetahui pembangunan manusia pada suatu regional. Mengingat, indikator pembangunan manusia yang multidimensi dan cukup mewakili kesejahteraan pada regional tersebut. Maqāsid Syarī'ah dibagi ke dalam 5 hal, yaitu Ḥifz Dīn (Perlindungan terhadap agama), Ḥifz Nafs (Perlindungan Jiwa), Ḥifz 'Aql (Perlindungan terhadap Akal), Ḥifz Nasl (Perlindungan Keturunan), dan Ḥifz Māl (Perlindungan terhadap Harta).

Jasser (2013), juga sedang mengarahkan maqāsid menuju *human development* sebagai obsesinya dalam mengekspresikan Maslahah (*public interest*). Karena menurutnya Maslahah ini seharusnya menjadi sasaran maqāsid. Realisasi dari maqāsid baru ini dapat dilihat secara empirik perkembangannya, diuji, dikontrol, dan divalidasi melalui *human development index* dan *human development targets* yang dicanangkan dan dirancang oleh badan dunia seperti Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

Dalam perkembangan pemikiran Cendekiawan Muslim, Imam Al-Harmayn (Imam Al-Juwayni), Imam Al-Ghazali, Ibnu Asyur, Imam Syatibi, Yusuf Qardhawi, dan Umer Chapra masing masing

mempunyai pandangan tersendiri dalam pengurutan kelima tujuan-tujuan Syarī'ah tersebut serta memiliki justifikasi yang kuat. Dalam penelitian ini, penulis ingin mengetahui sejauh mana peran Maqāsid Syarī'ah dalam pembangunan di 5 Provinsi Indonesia Bagian Timur, lebih tepatnya Human Development Index di 5 Provinsi di Indonesia bagian timur sebagai salah satu indikator pembangunan, dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di 5 Provinsi di Indonesia Bagian Timur. Pendekatan Maqāsid Syarī'ah yang digunakan adalah pendapat Imam Al-Ghazali, yang sangat mempertimbangkan Ḥifz Dīn (Perlindungan terhadap Agama) dalam tujuan-tujuan Syarī'ah dengan tujuan Kemaslahatan serta kesejahteraan bagi Manusia.

KAJIAN PUSTAKA

Definisi pembangunan telah semakin berkembang dengan didukung oleh pembangunan manusia (*human development*) sehingga terbentuk definisi pembangunan yang berorientasi pada manusia (*people centered development*) (Sumarsono, 2002). Definisi pembangunan yang berorientasi pada manusia ini disebut juga dengan paradigma pembangunan manusia (Syukir, dalam Castrenaningtyas, 2011).

Tantangan utama pembangunan adalah memperbaiki kualitas kehidupan. Pertama di negara negara yang paling miskin, kualitas hidup yang lebih baik memang mensyaratkan adanya pendapatan yang tinggi, namun yang dibutuhkan bukan hanya itu. Pendapatan yang lebih tinggi hanya merupakan salah satu dari banyak syarat yang harus dipenuhi. Banyak hal lain yang juga harus diperjuangkan, yakni pendidikan yang lebih baik, peningkatan standar kesehatan dan nutrisi, pemberantasan kemiskinan, perbaikan kondisi lingkungan hidup, pemerataan kesempatan, peningkatan kebebasan individual, dan pelestarian ragam kehidupan budaya.

Menurut Amartya Sen (1999), pertumbuhan ekonomi dengan sendirinya tidak bisa dianggap sebagai tujuan terakhir. Pembangunan haruslah lebih memperhatikan peningkatan kualitas kehidupan yang kita jalani dan kebebasan yang kita nikmati. Hal terpenting bukanlah apa yang dimiliki oleh seseorang, tetapi apakah yang dapat dilakukan seseorang dengan barang-barang

tersebut. Manfaat dari sebuah komoditi inilah yang menurut Sen dapat mempengaruhi kesejahteraan. Konsep ini disebut juga dengan pendekatan kapabilitas dari Sen.

Menurut Todaro (2006), menuliskan bahwa terdapat tiga komponen dasar atau nilai inti yang harus dijadikan basis konseptual dan pedoman praktis untuk memahami arti pembangunan, yakni peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai macam barang kebutuhan yang pokok (sandang, pangan, papan, kesehatan, keamanan), peningkatan standar hidup, serta perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial. Ketiga nilai inti tersebut berkaitan secara langsung dengan kebutuhan-kebutuhan manusia yang paling mendasar, yang terwujud dalam berbagai manifestasi di hampir semua masyarakat dan budaya sepanjang jaman.

Ahmad dalam Rafsanjani (2014), pada tulisannya menguraikan empat filosofis dasar-dasar pendekatan Islam dalam pembangunan, yaitu Tauhid, Rububbiyyah, Khilafah, dan Tazkiyah, serta fitur penting dari konsep pembangunan Islam, sebagai berikut Ahmad dalam Rafsanjani (2004):

- Pembangunan ekonomi dalam Islam bersifat komprehensif dan mengandung unsur spiritual, moral dan material. Pembangunan merupakan aktivitas yang berorientasi pada tujuan dan nilai. Aspek material, moral, ekonomi, sosial spiritual dan fiskal tidak dapat dipisahkan. Kebahagiaan yang ingin di capai tidak hanya kebahagiaan dan kesejahteraan material di dunia, tetapi juga di akhirat.
- Fokus utama pembangunan adalah manusia dengan lingkungan budayanya. Ini berbeda dengan konsep pembangunan ekonomi modern yang menegaskan bahwa wilayah operasi pembangunan adalah lingkungan fisik saja. Dengan demikian Islam memperluas wilayah jangkauan objek pembangunan dari lingkungan fisik kepada manusia.
- Pembangunan ekonomi adalah aktivitas multidimensional sehingga semua usaha harus diserahkan pada keseimbangan berbagai faktor dan tidak menimbulkan ketimpangan.
- Pembangunan ekonomi melibatkan sejumlah perubahan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, dan seimbang antara satu sama lain.

Penekanan utama dalam pembangunan menurut Islam, terletak pada pemanfaatan sumber daya yang

telah diberikan Allah kepada umat manusia dan lingkungannya semaksimal mungkin. Pemanfaatan sumber daya tersebut melalui pembagian, peningkatannya secara syukur dan adil dan mengutuk sikap kufur dan zalim. Maqashid Syariah adalah hal-hal dasar yang harus dipenuhi manusia demi mencapai falah, yaitu kebutuhan di dunia dan di akhirat. Tanpa memenuhi seluruh hal tersebut, maka manusia tidak akan mendapatkan kebahagiaan yang sempurna (al-Syatibi).

Kebutuhan dasar tersebut mencakup lima pokok kemaslahatan dengan peringkatnya masing-masing. Kelima pokok tersebut dijelaskan sesuai dengan urutannya yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta yang kemudian digolongkan lagi menjadi tiga kelompok kebutuhan, yaitu dharuriyyah, hajiyah, dan tashiniyyah yang akan dijelaskan berdasarkan tingkat kepentingan atau kebutuhannya Djamil (1995).

Menurut Chapra (2008), Kekuata Pembangunan terdiri dari karakteristik yang dinamis dan terdiri dari berbagai aspek yang multi disiplin. Maksud multidisiplin adalah keterkaitan yang saling berhubungan dengan variabel sosial ekonomi dan politik, termasuk kedaulatan dan kekuasaan politik (G), kepercayaan dan hukum atau syariah(S) rakyat (N), kesejahteraan dan ketersediaan sumber daya (W), Pembangunan (g) dan keadilan (j) dalam siklus dan hal yang saling terkait dan masing-masing saling mempengaruhi.

Aspek kepercayaan dan Syariah (S) menjadi sangat penting sekali sebagai landasan moral dari setiap aktivitas pembangunan yang selama ini diabaikan. Hasil penelitian menunjukkan *Islamic Human Development Index* (IHDI) diberbagai Provinsi tidak merata, Berarti ada yang salah dengan cara dan sistem kita membangun. Pembangunan yang tidak dilandaskan moral dan etik, adalah pembangunan yang hampa seperti halnya yang diungkapkan oleh Abdul Hasan Sadeq (2016).

Menurut Sadeq, Abul Hasan (2016), Pembangunan ekonomi dalam islam adalah sebagai sebuah keseimbangan dan kemajuan yang berkelanjutan dalam mencapai kesejahteraan manusia baik materi dan non materi. Ia merupakan gambaran proses pembangunan yang multidimensi yang terkandung di didalamnya peningkatan kesejahteraan, reorganisasi dan reorientasi keseluruhan sistem sosial dan ekonomi, dan peningkatan spritualitas, menurut ajaran islam.

UNDP mendefinisikan pembangunan manusia sebagai proses memperluas kesempatan dan kebebasan masyarakat untuk menentukan pilihannya dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan upaya memperbaiki tingkat penghargaan terhadap eksistensi masing-masing masyarakat sebagai manusia (Srinivasan, 1994). Indeks Pembangunan Manusia atau *Human Development Index (HDI)* merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur salah satu aspek penting yang berkaitan dengan kualitas dari hasil pembangunan, yaitu derajat perkembangan manusia (Tambunan, 2003). Indeks ini merupakan gabungan atas tiga kriteria sebagai output yang diharapkan dari proses pembangunan (UNDP, 2004): 1.

Ketahanan hidup, yang diukur dari angka harapan hidup (*Life Expectancy*) penduduk di suatu wilayah.
2. Pengetahuan yang diukur berdasarkan tingkat rata-rata melek huruf penduduk dewasa dengan bobot dua per tiga dan angka rata-rata lama masa sekolah penduduk di suatu wilayah dengan bobot sepertiga.

- Kualitas standar hidup diukur berdasarkan pendapatan perkapita riil yang disesuaikan dengan paritas daya beli (*purchasing power parity, PPP*) dari mata uang domestik masing-masing wilayah.

I-HDI merupakan alat yang digunakan untuk mengukur pembangunan manusia dalam perspektif Islam. I-HDI mengukur pencapaian tingkat kesejahteraan manusia dengan terpenuhinya kebutuhan dasar agar manusia dapat hidup bahagia di dunia dan akhirat (mencapai falah). Menurut al-Syatibi, masalah dasar bagi kehidupan manusia terdiri dari lima hal, yaitu agama (ad-dien), jiwa (an-nafs), akal (al-'aql), keturunan (An-nasl), dan harta (al-maal). Kelima hal tersebut merupakan kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan yang mutlak harus dipenuhi agar manusia dapat hidup bahagia di dunia dan akhirat.

Analisis Islamic Development Index di Indonesia. mengukur kelima dimensi tersebut dibentuklah suatu indeks yang diusulkan untuk mengukur kelima dimensi tersebut yaitu: index ad-dien yang mewakili dimensi agama, index an-nafs yang mewakili dimensi umur panjang dan sehat, index al-'aql yang mewakili dimensi pengetahuan, index an-nasl yang mewakili dimensi keluarga dan

keturunan, dan index al-maal yang mewakili dimensi pendapatan.

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah provinsi-provinsi di Kawasan Timur Indonesia dengan nilai IPM yang termasuk pada kategori menengah dan rendah pada tahun 2010-2018. Dalam penelitian ini, metode penentuan sampel yang digunakan adalah teknik *purposive sampling* yaitu metode penentuan sampel berdasarkan atas pertimbangan atau karakteristik tertentu dari penulis sesuai dengan maksud dan tujuan tertentu. Penulis menggunakan sampel lima provinsi di Indonesia Bagian Timur sebagai provinsi dengan tingkat pembangunan manusia yang masih rendah.

Penelitian ini dilakukan pada lima provinsi di Indonesia Bagian Timur (KTI), yaitu: Nusa Tenggara Timur (NTT), Gorontalo, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Lima provinsi tersebut merupakan daerah dengan tingkat pembangunan manusia yang masih rendah dan tingkat kemiskinan yang tertinggi di antara provinsi lainnya. Waktu penelitian yang digunakan adalah dari tahun 2010 sampai 2018 karena menyesuaikan dengan perhitungan IPM metode baru menurut BPS.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yakni data-data yang disajikan dalam bentuk angka atau bilangan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yakni jenis data yang diperoleh melalui hasil pengolahan pihak kedua dari hasil penelitian lapangannya, baik berupa data kualitatif maupun kuantitatif (Teguh, 2005).

Penelitian ini menggunakan metode analisis data panel. Data panel atau *pooled data* merupakan data yang terdiri dari gabungan data *crosssection* (beberapa objek) dan *time-series* (berdasarkan waktu). Menurut Gujarati (2005) dalam Suliyanto (2011), data panel atau pool data merupakan kombinasi data *time series* dan *cross section*, micropanel data, longitudinal data, analisis even history dan analisis cohort dengan variabel variabel Maqāsid Syarī'ah Imam Al-Ghazali terhadap Pembangunan Manusia, dengan variabel yang dimaksud adalah *Ḥifz Nafs (Life Index)*, *Ḥifz 'Aql (Intellectual Index)*, *Ḥifz Nasl (Family Social Index)*, *Ḥifz Māl (Property Index)* pada 5 Provinsi Indonesia bagian timur dengan bentuk model persamaan sebagai berikut:

$$HDI = \alpha_0 + \alpha_1 HEA_{it} + \alpha_2 EDU_{it} + \alpha_3 LNPOP_{it} + \alpha_4 LNINC_{it} + \alpha_5 LNIRG_{it} + \mu_{it} \dots$$

Dimana:

HDI = Indeks Pembangunan Manusia

HEA = Anggaran Kesehatan

EDU = Anggaran Pendidikan

LNPOP = Total Populasi

LNINC = Income Per Capita

LNIRG = Indeks Gini

α_0 = Intercept $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_5$ = Koefisien regresi variabel bebas

μ_{it} = Komponen error di waktu t untuk unit cross section i.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Peran Maqāsid Syarī'ah Al-Ghazali terhadap Pembangunan Manusia

Dalam pembahasan peran Maqāsid Syarī'ah Al-Ghazali terhadap pembangunan manusia kali ini, penulis membagi pembahasan tersebut ke dalam dua bagian, yakni Pembahasan secara Umum dan Pembahasan Secara Khusus.

Secara Umum, konsep Maqāsid Syarī'ah Al-Ghazali yang tertera dalam Al-Muṣṭaṣfah menggunakan pendekatan Uṣūl Fiqh, sehingga pembahasannya cukup meluas dimulai dari pembahasan Al-Aḥkām (*The Syaria Rules*) dimana dalam pembahasan tersebut Al-Ghazali membahas tentang Ḥukm (*The Syari'ah Address*) yang secara bahasa dapat disebut dengan peraturan, kewenangan dan yurisdiksi, yang dibagi ke dalam dua hal yakni Al-Qur'an (*waḥī mathuww*) dan Sunnah (*waḥī ghayr mathuww*). Dalam menjalankan kewenangan, peraturan dan yuridiksi tersebut, Al-Ghazali membagi konsekuensinya terhadap dua hal yaitu Ḥukm Taklifi (*the qualifying address*) dan Ḥukm Wad'I (*the positing address*).

Secara singkat, Al-Muṣṭaṣfā Al-Ghazali merumuskan hal yang ditentukan dan yang dilarang dan merangkumnya menjadi sebuah peraturan dengan menggunakan Pendekatan Uṣūl Fiqh. Hal ini diperjelas oleh Elahi dan Attia tentang penghindaran terhadap yang yang merusak lima hak esensi. Al-Ghazali mengatakan tentang baik dan buruk, dimana kedua hal tersebut bersifat relatif dilihat dari manfaat yang didapatkan oleh yang melakukannya, akan tetapi dalam hal Syaria, semuanya bersifat baik bagi yang

melaksanakannya. Mengingat sumber utama dari penegakan Sharia adalah Al-Quran dan Sunnah, secara umum, Al-Ghazali membagi Maqāsid Syarī'ah menjadi dua yakni Dīn dan Dunyawi. Sedangkan tujuan dari Maqāsid Syarī'ah menurut Al-Ghazali adalah Falah yang mana negara sebagai perantara kesejahteraan harus memenuhi Unsur *Check and Balances*.

Untuk mengetahui secara umum Konsep pembangunan Manusia dikembangkan dengan pendekatan Maqāsid Syarī'ah, penelitian ini mengumpulkan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan hal tersebut. Secara ringkas hasil indikator yang dapat digunakan dalam mengukur konsep pembangunan Manusia disajikan sebagai berikut.

Tabel 2. Pendekatan Maqāsid Syarī'ah

Topik	Elemen	Indikator
Hifz Nafs	Pencegahan dari hal yang membahayakan kesehatan	Perlindungan Kesehatan
Hifz 'Aql	Penghindaran dari hal yang merusak	Anggaran Pendidikan
Hifz Nasl	Mengurangi kendala yang menghambat keberlangsungan keturunan	Pertumbuhan Penduduk
Hifz Māl	Perlindungan Kekayaan dari ancaman perusakan dan pencurian; Distribusi yang merata	GDP/Capita Gini Rasio

b. Pengaruh Variabel Hifz Nafs (Perlindungan terhadap Jiwa) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Sebagaimana penjelasan sebelumnya pada sub bab Topik-topik Maqāsid Syarī'ah Al-Ghazali, telah dijelaskan bahwa untuk mendapatkan Falāh (kesejahteraan di dunia dan akhirat) maka salah satu indikator yang dapat memenuhi hal tersebut adalah usaha untuk memenuhi perlindungan terhadap jiwa. Hal ini dikarenakan pentingnya kondisi kesehatan yang prima, baik dalam jasmani dan rohani dapat menentukan kondisi kesejahteraan manusia di dunia. Pada penelitian kali ini, indikator yang dapat mengukur pengaruh perlindungan terhadap jiwa adalah anggaran kesehatan.

Berdasarkan tabel anggaran kesehatan memiliki nilai koefisien negative -9,80 dan signifikan

dengan nilai probabilitas sebesar 0.0002. Hal ini berarti ketika anggaran kesehatan pada lima provinsi di Indonesia bagian timur meningkat sebesar 1% yang berarti terjadi peningkatan alokasi anggaran belanja provinsi untuk sektor kesehatan, maka akan menurunkan IPM sebesar 9,80 persen. Oleh karena itu, hipotesis yang menyatakan bahwa anggaran kesehatan berpengaruh positif terhadap pembangunan manusia di lima provinsi Indonesia bagian timur dapat diterima. Meskipun demikian, hasil ini berbeda dengan beberapa penelitian sebelumnya yang menyatakan anggaran kesehatan dapat meningkatkan pembangunan manusia sehingga diperlukan analisis lebih lanjut.

Hasil estimasi pengujian tersebut berbeda dengan teori yang ada, yaitu menurut Ranis et.al (2000) tentang pertumbuhan ekonomi yang akan berdampak positif bagi pembangunan manusia, jika pertumbuhan ekonomi tersebut memiliki konsentrasi yang tinggi terhadap aspek- aspek pembangunan manusia seperti pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, seharusnya dengan meningkatkan anggaran kesehatan sebagai salah satu bentuk proteksi terhadap jiwa, maka Indeks Pembangunan Manusia juga akan meningkat.

Berangkat dari konsep Maqāsid Syarī'ah pada indeks Hifzu nafs juga meliputi perlindungan secara fisik yang didalamnya juga termasuk pemenuhan kebutuhan pangan, angka harapan hidup, juga perlindungan kesehatan sebagai upaya pencegahan dari hal yang membahayakan kesehatan. Dengan tingkat kesehatan yang baik dari suatu penduduk maka menentukan angka harapan hidup penduduk tersebut. Ayat al-Qur'an yang menganjurkan perlunya menjaga kesehatan juga telah tertuang dalam al-Qur'an surat al-Baqoroh: 168.

Akan tetapi, dalam teori Human Capabilities atau Pembangunan Manusia, Sen (1999) menjelaskan bahwa salah satu elemen dasar dalam pembangunan adalah kebebasan berpolitik yang bertujuan untuk menjadi *well-being*. Thesis Sen (1999) tersebut kemudian dijadikan salah satu bahasan oleh Evans (2008) yang membandingkan teori Pembangunan Manusia sebagai salah satu alternatif Pembangunan Ekonomi dengan Pembangunan Ekonomi melalui Pendekatan Institusional.

c. Variabel Hifz 'Aql (Perlindungan terhadap Akal) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan Manusia dengan analisis pendekatan Maqāsid Syarī'ah Al-Ghazali adalah Akal/Pemikiran. Untuk mengetahui upaya perlindungan terhadap Akal, penelitian ini menggunakan elemen Perlindungan terhadap hal yang membahayakan akal dan Anggaran Pendidikan sebagai Indikator untuk mengukur perlindungan terhadap akal.

Hal ini dikarenakan, Pendidikan merupakan hal esensi dari pembangunan manusia yang mendorong manusia dapat mengembangkan pemikirannya, mengingat dalam paradigma pembangunan manusia, Manusia merupakan objek utama pembangunan (Ulhaq, 2003) sehingga untuk mengetahui seberapa besar pembangunan pada suatu regional maka perlu diketahui pula signifikansi pendidikan dalam pembangunan. Dalam Islam pendidikan merupakan salah satu topik pembangunan manusia yang dapat menuntun manusia menuju Falāh (Kesejahteraan di Dunia dan Akhirat).

Berdasarkan anggaran Pendidikan berpengaruh positif dengan memiliki nilai koefisien 6.75 dan signifikan dengan nilai probabilitas sebesar 0.0002. Hal ini berarti ketika anggaran pendidikan pada lima provinsi di Indonesia bagian timur meningkat sebesar 1 persen yang berarti terjadi peningkatan alokasi anggaran belanja provinsi untuk sektor pendidikan, maka akan meningkatkan IPM sebesar 6.75 persen. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa anggaran pendidikan berpengaruh terhadap pembangunan manusia pada lima provinsi di Indonesia Bagian Timur dapat diterima.

Hal ini sesuai dengan pendapat Ranis et.al (2000) tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi bagi pembangunan manusia, dimana pertumbuhan ekonomi akan berdampak positif bagi pembangunan manusia jika pertumbuhan ekonomi tersebut lebih banyak berkaitan dengan Topik-topik pembangunan Manusia. Begitu pula dalam Topik pembangunan Manusia dengan pendekatan Maqāsid Syarī'ah Al-Ghazali, yaitu untuk mendapatkan kesejahteraan maka perlu adanya upaya untuk menghilangkan kendala yang menghambat pendidikan/akal, dan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur

perlindungan terhadap Pendidikan adalah Anggaran Pendidikan (Mili, 2014).

d. Variabel *Ḥifz Nafsi* (Perlindungan terhadap Keturunan) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Salah satu perbedaan antara pembangunan manusia dalam konteks konvensional dengan pembangunan manusia melalui pendekatan *Maqāṣid Syarī'ah* Al-Ghazali adalah pembahasan topik perlindungan terhadap keturunan yang tidak dapat ditemukan dalam pembahasan pembangunan manusia melalui pendekatan konvensional. Hal ini dikarenakan, pertumbuhan penduduk, tumbuh secara deret geometri, sedangkan ketersediaan bahan makanan tumbuh secara deret aritmatika, sehingga kedua hal tersebut akan bertolak belakang. (Malthus, 1978).

Padahal dalam pandangan *Maqāṣid Syarī'ah* Al-Ghazali, perlindungan terhadap keturunan merupakan salah satu elemen dari pembangunan manusia itu sendiri. Karena dengan adanya perlindungan terhadap keturunan yang dapat dilihat dari elemen pengurangan kendala yang menghambat keberlangsungan keturunan dan memelihara keberlangsungan keluarga. Hal ini dikarenakan, peran keluarga dalam menanamkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari sangat penting, karena komunikasi yang dapat lebih intens, dengan tujuan utama adalah mendapatkan *Falāḥ*.

Berdasarkan hasil perhitungan, variabel pertumbuhan penduduk atau total populasi berpengaruh negatif dengan nilai koefisien -8.89 dan signifikan dengan nilai koefisien 0,0036. Hal ini berarti ketika terjadi pertambahan populasi meningkat 1 persen pada lima provinsi Indonesia Bagian Timur akan menurunkan pembangunan manusia sebesar 8,89 persen. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa total populasi berpengaruh negatif terhadap pembangunan manusia pada lima provinsi di Indonesia Bagian Timur dapat diterima.

Hal ini dikarenakan, kualitas Sumber Daya Manusia di 5 Provinsi Indonesia Bagian timur masih rendah, penduduknya mayoritas muslim, tapi hal tersebut tidak menunjukkan kualitas muslim sesungguhnya.

e. Variabel *Ḥifz Māl* (Perlindungan terhadap Kekayaan) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Elemen pertama yang dapat digunakan untuk mengukur perlindungan terhadap Kekayaan adalah Peningkatan Kekayaan dengan Indikator *Income Per Capita* (Anto, 2010). Hasil estimasi yang disajikan dalam tabel menjelaskan bahwa variabel *Income Per Capita* berpengaruh negatif dengan nilai koefisien -0.000137 dan signifikan dengan nilai probabilitas sebesar 0.00. hal ini berarti ketika *income per capita* meningkat satu persen dapat menurunkan indeks pembangunan manusia sebesar 0,0000137. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa *income per capita* terhadap pembangunan manusia pada lima provinsi di Indonesia Bagian Timur dapat diterima. Sehingga dapat diketahui bahwa hal tersebut sesuai dengan topik ekonomi Pembangunan Manusia dan topik pembangunan manusia dengan menggunakan analisis pendekatan *Maqāṣid Syarī'ah* Al-Ghazali.

Elemen kedua yang dapat digunakan untuk mengukur perlindungan terhadap kekayaan adalah distribusi yang merata. Anto (2010) menggunakan Indikator Indeks gini untuk mengukur pengaruh perlindungan terhadap kekayaan terhadap Pembangunan Manusia. Jika dilihat dari tabel 10 dapat diketahui bahwa Indikator Indeks gini berpengaruh positif dengan nilai koefisien 5.6 dan tidak signifikan dengan nilai probabilitas sebesar 0.5 terhadap Pembangunan Manusia lima provinsi Indonesia bagian timur. Hal tersebut tidak sesuai dengan teori pembangunan manusia dengan analisis pendekatan *Maqāṣid Syarī'ah* Al-Ghazali, yaitu sebagai bentuk perlindungan terhadap kekayaan, distribusi yang merata merupakan aspek yang penting agar manusia mendapatkan hak yang sama untuk memenuhi kebutuhannya (Anto, 2010).

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Variabel *Ḥifz Nafsi* berpengaruh negatif dengan nilai koefisien negative -9,80 dan signifikan dengan nilai probabilitas sebesar 0.0002 terhadap Indeks Pembangunan Manusia Manusia di 5 Provinsi Indonesia Bagian Timur Tahun 2010- 2018. Variabel *Ḥifz Māl* pertama berpengaruh negatif koefisien -0.000137 dan signifikan dengan nilai probabilitas sebesar 0.00 terhadap Indeks Pembangunan Manusia Manusia di 5 Provinsi Indonesia Bagian Timur Tahun 2010-2018.

Variabel *Hifz Nasl* populasi berpengaruh negatif dengan nilai koefisien -8.89 dan signifikan dengan nilai koefisien 0,0036. terhadap Indeks Pembangunan Manusia Manusia di 5 Provinsi Indonesia Bagian Timur Tahun 2010-2018. *Hifz 'Aql* berpengaruh positif dengan memiliki nilai koefisien 6.75 dan signifikan dengan nilai probabilitas sebesar 0.0002 terhadap Indeks Pembangunan Manusia Manusia di 5 Provinsi Indonesia Bagian Timur Tahun 2010- 2018. Variabel *Hifz Māl* elemen kedua berpengaruh positif dengan nilai koefisien 5.6 dan tidak signifikan dengan nilai probabilitas sebesar 0.5 terhadap Indeks Pembangunan Manusia Manusia di 5 Provinsi Indonesia Bagian Timur Tahun 2010-2018.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali, al-Mustasfā, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1993).
- Amin, Ruzita Mohd., Yusof, Selamah Abdullah., Haneef, Mohamed Aslam., Muhammad, Mustafa Omar., Oziev, Gapur. (2013). “The Integrated Development Index (I-DEX): A New Comprehensive Approach to Measuring Human Development” International Islamic University Malaysia.
- Anto, Hendri. MB. (2010). “Introducing an Islamic Human Development Index (I-HDI) to measure development in OIC Countries”, IRTI Journal, Vol.19 No.2.
- Arisman. (2018). Determinant of Human Development Index in ASEAN Countries. Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi, 7 (1), 113–122.
- Bintang P, M (2015). Determinan Indeks Pembangunan Manusia : Analisa Pendekatan Maqasida Syariah Al Ghazali (Studi Kasus: Negara-Negara OKI). Eksyar, Volume 02, Nomor 02, November 2015: 512-534
- BPS Indonesia. (2019). Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota, 2010-2018 (Metode Baru).
- Chapra, Umer. (2008). The Islamic Vision of Development in the Light of Maqashid Syariah.
- Chapra, Umer. Ibn Khaldun’s theory of development: Does it help explain the low performance of the present-day Muslim world? (The Journal of Socio-Economics 37. (2008). The Islamic Vision of Development in the Light of Maqāsīd Al-Sharī‘ah. (Working paper, researchGate 2008)
- Hamid, Zarinah., Amin, Ruzita Mohd. (2013). “Trade and Human Development in OIC Countries: A Panel data Analysis”, IRTI Journal, Vol 21 No.2
- Hammad, Ahmad Zaki Mansur. (1987). Abu Hamid Al-Ghazali’s Juristic Doctrine in Al-Mustafa Min Ilm Al-Usul with A Translation of Volume One of Al-Mustafa Min Ilm Al-Usul. Volume One. A Dissertation Submitted to the Faculty of The Division of the Humanities in Candidacy for the Degree of Doctor of Philosophy, Departement of Near Eastern Languages and Civilization, The University of Chicago.
- Miraç Eren and Selahattin Kaynak. An evaluation of EU member states according to human development and global competitiveness dimensions using the multi- p e r i o d grey relational analysis (MP-GRA) technique Application Vol. 7 No1, (2017) pp. 60-70 © Emerald Publishing Limited
- P3EI. (2012). Ekonomi Islam. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan Keempat.
- Rafsanjani, Haqiqi. 2014. Analisis Islamic Human Development Index Di Indonesia. Tesis, Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Airlangga.
- Ruzita Mohd Amin dkk. The Integrated Development Index (I-Index) a new comprehensive approach to measuring human Development, (ResearchGate, Blomsbury Qatar Foundations journal vol. 2 thn (2015).
- Sadeq, Abul Hasan, Development Issues in Islam, International Islamic University Malaysia (2016).
- Srinivasan, T. N. (1994). Humand Development: A New Paradigm or Reinvention of the Wheel? The American Economiv Review. Vol. 84, No. 2. May 1994. 238-243.
- Sugiyono, 2013. Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sumarsono, Soni dan Sahat Marulitua. (2002). Indeks Pembangunan Ekonomi: Review atas Teori Pembangunan Dunia Ketiga, (online), (www.stkip-jb.ac.id, diakses 30 Desember 2009 oleh Mega Castrenaningtyas).
- Sen, Amartya. (1999). “Democracy as Universal Value” Journal of Democracy

- 10.3: 3-17 Sen, Amartya. 2002. "Why Health Equity?" *Health Economics*. 11 :659-666
- Teguh, M. (2005). *Metodologi Penelitian Ekonomi: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- The World Bank. (2019a). Current health expenditure (% of GDP).
- The World Bank. (2019b). Government expenditure on education, total (% of GDP).
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2006). *Pembangunan Ekonomi (Edisi Kesebelas Jilid 1)*. Jakarta: Erlangga.
- Ul Haq, Mahbub. (2003). "The Human Development Paradigm" 17-34 In *Readings in Human Development*, edited by Sakiko Fukkuda and A'K Syiva Kuma, Oxford University Press.